JRAK
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)
p–ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298
Vol. 10, No. 1, Januari 2024
https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN INDONESIA: MASA NORMAL DAN MASA PANDEMI COVID-19 (2020-2023)

Greace Havana Tamba[1], Gideon Tarigan[2], Hendra Inbowo Simanjuntak[3], Viona Tasya Br Siahaan[4], Hamonangan Siallagan[5], Christnova Hasugian[6]
Universitas HKBP Nomensen Medan
Email: greacehavana@gmail.com[1]

ABSTRACT

When the country is experiencing a fiscal deficit, especially during a crisis, the issuance of government bonds is considered a necessity, predominantly to finance productive sectors. This paper aims to analyze the effect of financing originating from Government Bonds (SBN) on poverty levels in Indonesia. The analysis is carried out over a period from normal times (2012- 2019) to the Covid-19 pandemic crisis (2020-2022). The method of this study is explanatory research through a quantitative approach and multiple linear regression in this study using SPSS 25. The findings from this study are that there has been an increase in SBN and government allocation on social assistance spending. Generally, social assistance policies have also proven effective in reducing the percentage of poverty in the entire community, especially rural communities, yet have not been able to reduce urban poverty. Meanwhile, at the time of Covid 19 Pandemic, the increase of SBN cannot automatically eradicate poverty, as the social assistance budget does not have a significant effect on the percentage of poverty in urban areas.

Keywords: *SBN, pandemic, poverty*

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan beragam dinamika ekonomi, selalu dihadapkan pada tantangan kompleks dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu indikator penting yang menjadi fokus perhatian adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga mencerminkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) menjadi salah satu instrumen yang memiliki potensi untuk memengaruhi tingkat kemiskinan.

Masa pandemi Covid-19 membawa dampak ekonomi yang signifikan, dengan berbagai kebijakan pemerintah

untuk mengatasi dampak tersebut, termasuk melalui pembiayaan SBN.

Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang bagaimana pembiayaan SBN berkontribusi terhadap mitigasi kemiskinan di Indonesia menjadi krusial. Analisis ini tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan kebijakan publik. Dengan merinci perbedaan antara masa normal dan masa pandemi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang peran pembiayaan SBN dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Melalui pendekatan analitis yang cermat, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi hubungan antara pembiayaan SBN dan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan ekonomi dan keuangan di Indonesia, khususnya dalam konteks mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa normal dan masa pandemi Covid-19.

Menurut (OSBC, 2023) pada tahun 2020, cara pemerintah mengatasi krisis ekonomi adalah dengan menggerakkan ekonomi nasional yang sempat beku akibat pandemi. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk bantuan masyarakat agar mereka memiliki daya beli. Selain itu, pemerintah juga berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian intensif kepada korporasi maupun UMKM. Sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga dan melakukan pembelian Surat Berharga Negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas keuangan sehingga mendorong aktivitas dunia usaha.

Penerbitan SBN secara masif dianggap wajar mengingat kondisi keuangan suatu negara dalam hal ini penerimaan negara selalu lebih kecil dibandingkan belanja negara. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya defisit pada ruang fiskal tersebut, pemerintah dapat mencari sumber pembiayaan lain yang bisa dimanfaatkan. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka mengenai kajian terdahulu yang terkait dengan SBN dan tingkat kemiskinan, lalu dilanjutkan dengan penjelasan metode yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun pada bagian hasil dan pembahasan akan dijelaskan seberapa signifikan pengaruh SBN terhadap tingkat kemiskinan Indonesia yang mencakup periode normal dan periode pandemi Covid-19. Terakhir, pada bagian kesimpulan akan dijelaskan rangkuman sekaligus rekomendasi dari penelitian ini.

SBN sebagai salah satu instrumen pembiayaan telah berfungsi untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal kita yang defisit akibat berkurangnya penerimaan negara karena melemahnya aktivitas ekonomi. SBN juga berhasil membantu meningkatkan porsi anggaran untuk program PEN termasuk belanja-belanja yang bertujuan untuk membantu menekan angka kemiskinan. Periode tahun 2020-2022, total pembiayaan utang yang diperoleh melalui penerbitan SBN adalah mencapai Rp2.788,6 triliun dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.

Gambar 1

Pencapaian Pemenuhan Pembiayaan Utang
Sumber: DJPPR Kemenkeu, 2023

Realisasi tersebut dapat dengan sukses dipenuhi salah satunya berkat adanya sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang sangat baik. UU Nomor 2 tahun 2020 memungkinkan BI sebagai bank sentral dapat membeli SBN pemerintah di pasar perdana pada masa krisis, sehingga membuat SBN pemerintah dapat langsung diserap oleh BI. Gambar 2 di bawah merupakan ilustrasi dari tren pembelian SBN oleh BI.

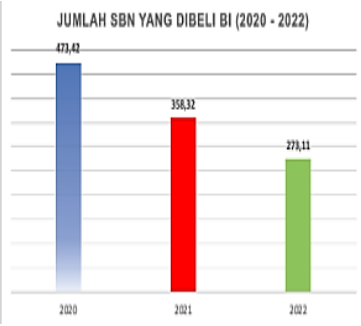

Gambar 2
Jumlah SBN yang Dibeli BI
Sumber: Bank Indonesia, 2023 diolah

Selama tiga tahun terakhir, jumlah SBN yang dibeli oleh BI mengalami penurunan, meskipun demikian angka tersebut masih relatif tinggi. Secara keseluruhan, pembelian SBN oleh BI untuk pembiayaan APBN selama kurun tahun 2020-2022 atas dasar UU Nomor 2 Tahun 2020 adalah berjumlah Rp1.104,85 triliun. Tentunya angka pembiayaan utang yang besar ini yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini apakah benar-benar efektif dikelola dengan baik untuk program pemulihan ekonomi nasional, terutama di masa pandemi Covid-19 dan punya dampak terhadap penurunan angka kemiskinan Indonesia.

Pandemi Covid-19 memiliki imbas yang sangat besar pada pertumbuhan ekonomi, berkurangnya aktivitas ekonomi masyarakat membuat pertumbuhan ekonomi menurun, pertumbuhan ekonomi yang menurun menyebabkan naiknya angka kemiskinan. Studi dari (Surhayadi, 2020) mengemukakan tentang skenario pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di tahun 2020.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan fokus menjawab pertanyaan berikut: apakah terdapat pengaruh SBN terhadap angka kemiskinan Indonesia dengan anggaran bantuan sosial (bansos) sebagai mediasi? Adapun, penulis membatasi penelitian ini hanya sebatas realisasi SBN di masa normal sampai masa pandemi (tahun 2012-2022), sementara angka persentase kemiskinan yang dijadikan objek analisis adalah periode tahun 2012–2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peningkatan SBN terhadap angka kemiskinan Indonesia di masa pandemi serta dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah agar pengelolaan utang negara dapat lebih prudent dan efektif.

Metode Penelitian

Data dalam penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa variabel. Data realisasi pembiayaan utang yang berasal dari SBN sebagai variabel independen (variabel X), realisasi belanja bantuan sosial sebagai variabel mediasi, dan variabel persentase kemiskinan sebagai variabel Y. Sumber data penelitian ini diperoleh dari

Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia. Data yang diambil dimulai dari periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan penelitian kausal (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kausal, variabel independen sebagai variabel sebab (variabel X) dan variabel dependen sebagai variabel akibat atau variabel tak bebas (variabel Y). Selain variabel X dan variabel Y, terdapat pula variabel mediasi atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel X dan memengaruhi variabel Y.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda. Variabel independennya adalah jumlah SBN; variabel dependennya adalah jumlah alokasi bantuan sosial; dan variabel kontrolnya adalah penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Aplikasi yang dipakai untuk melakukan *regresi linear* berganda dalam penelitian ini adalah SPSS 25.

Beberapa referensi yang menjadi acuan model yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal, seperti yang ditulis oleh Normasyhuri et al., (2022). Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa surat utang negara digunakan untuk memenuhi bantuan sosial bagi masyarakat saat krisis pandemi tiba. Sementara hubungan antara variabel bantuan sosial dan tingkat kemiskinan banyak diteliti, namun masih pada level provinsi atau kabupaten kota. Hasil penelitian juga masih terbagi, misalnya Melati et al., (2021) menyebut anggaran bantuan sosial tidak memiliki pengaruh signifikan pada persentase kemiskinan di Jawa Barat. Sementara Sinaga et al., (2022) menyebutkan anggaran bantuan sosial memberi pengaruh pada persentase kemiskinan di Sumatera Utara. Dengan referensi tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini ada dua, seperti terlihat pada Gambar 3.

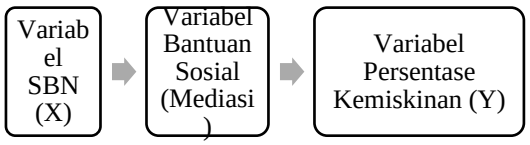

Gambar 3
Bagan Kerangka Konseptual

Hipotesis 1: Terdapat pengaruh searah yang signifikan antara jumlah SBN terhadap anggaran bantuan sosial.

Hipotesis 2: Terdapat pengaruh berbalik yang signifikan antara jumlah anggaran bantuan sosial terhadap persentase kemiskinan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko/DJPPR 2023, selama 12 tahun ke belakang, SBN menunjukkan tren peningkatan. Adapun dana yang terkumpul dari investor mencapai kenaikan yang signifikan, yaitu dari hanya Rp1.188 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp7.734 triliun pada tahun 2022. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada masa pandemi, yaitu pada tahun 2020 dan 2022, yaitu berkisar belasan persen per tahun seperti yang disajikan pada Gambar 4.

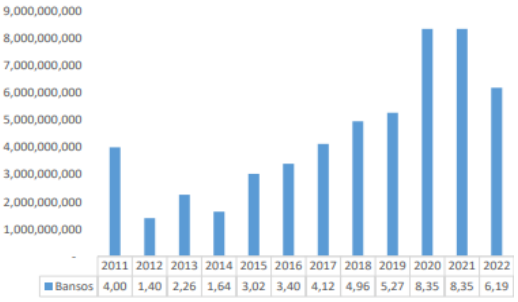

Gambar 4
Anggaran Bantuan Sosial 2014-2022 (Rp Triliun)
Sumber: BPS, 2023, diolah

Perbedaan antara kondisi normal dengan kondisi pandemi memang terlihat dalam komposisi anggaran APBN Indonesia. Pada bagian bantuan sosial, jumlah anggaran di masa normal hanya menghabiskan Rp3,3 triliun saja. Akan tetapi pada masa krisis, nilai anggaran bansos naik lebih dari dua kali lipat menjadi Rp7,6 triliun. Sementara pada sisi SBN, nilai kenaikannya juga sangat signifikan, yaitu dari Rp2.472 triliun menjadi Rp6.349 triliun. Kenaikan anggaran bansos dan SBN ini sama-sama lebih dari dua kali lipat dan lebih besar dibanding penerimaan negara dari pajak atau bukan pajak yang dari persentase maupun signifikansi di bawah SBN dan bansos seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan antara Angka Bantuan Sosial (BS), SBN, Penerimaan Negara Pajak (PNP), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kondisi Normal dan Pandemi

Pos Anggaran	Kondisi	N	Rata-rata (Triliun)	Sig.
BS	Kondisi Normal	9	3,35	0,001
	Kondisi Pandemi	3	7,63	
SBN	Kondisi Normal	9	2.472	0
	Kondisi Pandemi	3	6.349	
PNP	Kondisi Normal	9	1.223	0,055
	Kondisi Pandemi	3	1.586	
PNBP	Kondisi Normal	9	3.426	0,052
	Kondisi Pandemi	3	4.377	

Sumber: BPS, 2023 diolah

Pengaruh SBN pada Bantuan Sosial

Hubungan kausalitas antara SBN terhadap pengeluaran bantuan sosial pemerintah dapat diketahui dengan melakukan analisis *regresi linear*. Hasil *regresi linier* berganda yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kenaikan SBN terhadap anggaran bansos memiliki pengaruh yang signifikan positif atau bersifat direct relationship. Artinya, jika angka SBN naik maka angka bantuan sosial juga naik. Pengujian ini menjawab hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini bahwa ada pengaruh kenaikan SBN terhadap angka bansos. Derajat signifikansi SBN yang signifikan tersebut berada di bawah satu persen (0,4 persen), lalu diikuti oleh variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu variabel Penerimaan Negara dari Pajak/PNP (9,7 persen), akan tetapi tidak diikuti oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP (52,7 persen) seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil regresi Linier Berganda

Variabel	T	Sig
Konstanta	1.811	0.113
SBN	6.214	0.004
PNP	-2.127	0.097
PNBP	-0.19	0.527

Sumber: DJPPR dan BPS, 2023 diolah

Pengaruh SBN yang signifikan terhadap pengeluaran bantuan sosial tidak lepas dari kondisi pandemi yang memaksa pemerintah melakukan aneka kebijakan sosial untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi kesusahan (Hanoatubun, 2020). Kebijakan sosial diperlukan oleh pemerintah pada waktu itu karena kondisi masyarakat yang mengalami keterbatasan aktivitas ekonomi, apalagi untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan (Barrientos, 2011). Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan baru pulih pada tahun 2021.

Pertumbuhan pada tahun 2021 juga belum memuaskan, sebab pertumbuhan hanya terjadi dengan persentase 3 persen atau di bawah 5 persen. Pertumbuhan ekonomi kembali mencapai angka 5 persen setelah tahun 2022, seiring dengan menurunnya efek negatif pandemi Covid-19.

Pengaruh Pengeluaran Bantuan Sosial pada Persentase Kemiskinan

Pendapatan negara dari SBN dapat dihubungkan dengan pengentasan kemiskinan Masyarakat (Junaedi, 2018), salah satunya melalui perantara anggaran bantuan sosial yang dianggarkan oleh pemerintah (Mi, 2008). Sebab, anggaran pemerintah dalam APBN yang tujuannya spesifik mengentaskan kemiskinan adalah anggaran bantuan sosial. Peran anggaran bantuan sosial semakin terasa relevansinya saat masa krisis pandemi Covid-19. Pada masa Covid-19, angka kemiskinan mengalami kenaikan kembali setelah pada tahun 2018 dan 2019 angkanya menurun. Dari segi persentase, persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi dalam sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan Gambar 6, fluktuasi terjadi terutama ketika ada fenomena krisis akibat pandemi Covid-19. Padahal, tren persentase kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan yang konsisten dari 2013 sampai 2019. Secara lebih rinci, tren penurunan terjadi di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Saat pandemi terjadi, angka persentase kemiskinan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama di wilayah kota.

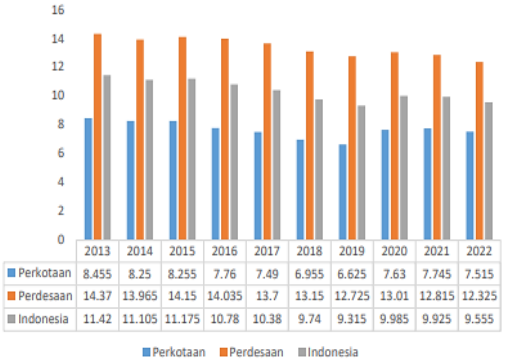

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perkotaan	8.455	8.25	8.255	7.76	7.49	6.955	6.625	7.63	7.745	7.515
Perdesaan	14.37	13.965	14.15	14.035	13.7	13.15	12.725	13.01	12.815	12.325
Indonesia	11.42	11.105	11.175	10.78	10.38	9.74	9.315	9.985	9.925	9.555

Gambar 6
Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan, Pedesaan, dan Seluruh Indonesia
Sumber: BPS (Statistik, 2022) diolah

Pengaruh surat berharga negara pada anggaran bansos sudah terbukti memiliki hubungan yang signifikan positif. Setelah itu, perlu diketahui pengaruh antara anggaran bansos terhadap persentase kemiskinan di Indonesia. Hasil uji pengaruh antara anggaran bansos dan persentase kemiskinan dilakukan dengan regresi linier sederhana atau hanya memakai variabel X dan variabel Y saja, tanpa variabel kontrol. Hasil uji pengaruh menunjukkan bahwa anggaran bantuan sosial berpengaruh signifikan negatif pada persentase kemiskinan di Indonesia, terutama di kawasan pedesaan. Temuan ini sama seperti dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti (Samputra, 2019) dan (Sinaga, 2022). Pada sisi yang lain, anggaran bansos tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persentase kemiskinan di daerah perkotaan. Derajat pengaruh bantuan sosial pada persentase kemiskinan juga berbeda. Pengaruh paling besar terjadi pada persentase kemiskinan di desa (66 persen), lalu seluruh Indonesia (47 persen), dan persentase kemiskinan di kota (11 persen). Perbedaan pengaruh antara anggaran bantuan sosial kepada desa dan kota tidak lepas dari faktor sosial-ekonomi dan pengelolaan anggaran oleh pemerintah sendiri (Balvociute, 2020).

Hasil uji regresi variabel bantuan sosial pada variabel kemiskinan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Regresi Variabel Bantuan Sosial pada Variabel Kemiskinan

Variabel	*Coefficients*	P-value	R *Square*
Kemiskinan di Desa	-0.00019677	0.013178	0.668421
Kemiskinan di Kota	-0.00008057	0.407431	0.116761
Kemiskinan di Seluruh Indonesia	-0.00019111	0.060083	0.471203

Sumber: BPS (Statistik, 2023) diolah

Peran penting pemerintah dalam bentuk anggaran bantuan sosial yang bersumber dari pendapatan negara (salah satunya SBN) bisa dibilang sangat efektif membendung kenaikan jumlah warga miskin (Nyathi, 2022). Pada masa pandemi 2020, angka kemiskinan melonjak tinggi. Kemiskinan di sektor perkotaan naik 15 persen, pedesaan 2 persen, dan Indonesia secara keseluruhan naik 7 persen. Berkat jumlah anggaran bansos yang dinaikkan, setidaknya persentase kemiskinan dapat diturunkan kembali pada tahun 2021 dan 2022 (Tabel 3). Berdasarkan Gambar 7, progres persentase warga miskin di kota berkurang 1 persen pada tahun 2021 dan berkurang 4 persen pada tahun 2022. Hal serupa juga terjadi pada daerah pedesaan. Seperti yang diuraikan di awal analisa, pandemi sudah menimbulkan jumlah warga miskin dunia bertambah. Akan tetapi, seiring berkurangnya efek negatif dari virus Covid-19, ditambah peran aktif pemerintah, jumlah warga miskin dapat ditekan kembali. Dengan kata lain, kebijakan sosial berupa bantuan sosial adalah manajemen krisis terhadap khususnya, kondisi krisis pandemi.

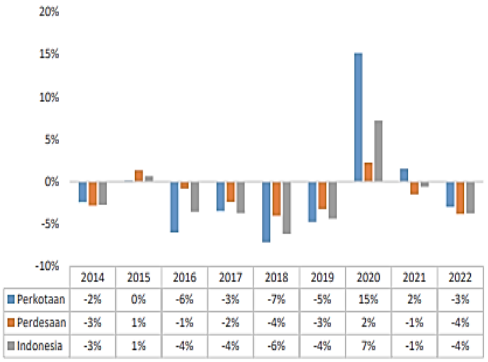

Gambar 7
Progres Persentase Warga Miskin di Perkotaan, Pedesaan, dan Indonesia
Sumber: BPS, 2023 diolah

Risiko Rasio Utang yang Berlebihan

Pada bagian awal tulisan dijelaskan bahwa kenaikan SBN yang diterbitkan oleh pemerintah merupakan kebijakan pada masa krisis. Pemerintah telah menaikkan batas rasio utang agar dapat mendapat uang tambahan guna membantu masyarakat yang kesusahan. Meskipun kenaikan SBN pada masa normal maupun masa pandemi bisa menaikkan anggaran bantuan sosial dan akhirnya menurunkan persentase kemiskinan, pengampu kebijakan tetap harus waspada. Sikap waspada tersebut perlu ditingkatkan, sebab rasio kerentanan fiskal Indonesia mengalami pelemahan. Kerentanan pada bagian rasio fiskal yang mengalami kenaikan tersebut dapat dilihat dari dua indikator pada Gambar 8 dan Gambar 9. Gambar 8 menunjukkan rasio Debt to GDP yang naik dari 30 persen menjadi 40 persen pada masa pandemi. Meskipun masih di angka 40 persen atau masih di bawah batas regulasi yang berlaku (60 persen) dan standar IMF (64 persen), kenaikan utang perlu diperhatikan karena dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan. Karena jika tidak dikelola dengan memperhatikan risiko yang ada, maka utang yang bertambah akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan juga bisa menaikkan kerentanan sebuah negara (Caner, 2010).

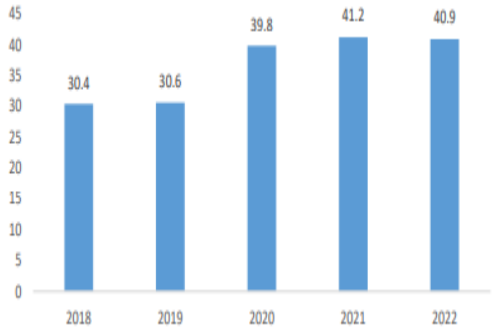

Gambar 8
Debt to GDP (%)
Sumber: BPS, 2023, diolah

Kenaikan belanja bunga terhadap pendapatan negara juga sama seperti rasio debt to GDP, yaitu sama-sama rentan. Pada tahun 2019, persentase belanja bunga terhadap pendapatan APBN hanya 7 persen. Angka tersebut naik menjadi tiga kali lipat saat pandemi tiba yaitu menjadi 24 persen seperti uang disajikan pada Gambar 9.

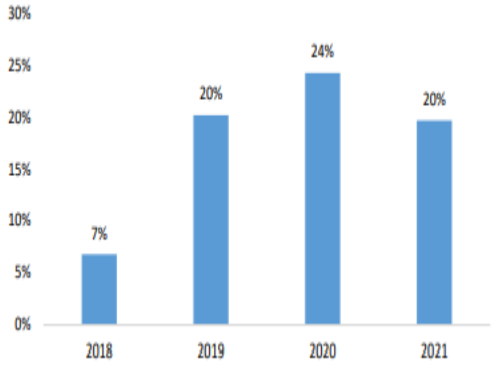

Gambar 9
Persentase Belanja Bunga Terhadap Pendapatan APBN
Sumber: BPS, 2023, diolah

Rasio fiskal yang rentan ini memicu kerentanan Indonesia seandainya perekonomian global mengalami fluktuasi. Fluktuasi tersebut bisa dipicu oleh rezim suku bunga tinggi yang secara langsung akan berdampak pada terjadi *capital outflow* atau asing membawa dananya keluar Indonesia, maka imbal hasil SBN akan kembali naik. Kenaikan imbal hasil perlu segera dilakukan untuk membuat investor tertarik untuk kembali menanamkan uangnya di dalam negeri. Bila imbal hasil naik dan, maka dampaknya harus ditanggung oleh fiskal dengan membayar bunga lebih tinggi. Selain itu, dampak berupa inflasi juga harus diperhatikan mengingat defisit fiskal akan memicu inflasi (Catao, 2005) Sehingga, kenaikan suku bunga dan inflasi betul-betul harus dimitigasi dampaknya, agar tidak menimbulkan shock terhadap APBN dan kondisi makro ekonomi merepresentasikan kondisi yang optimis (Acemoglu, 2003).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, kenaikan pemasukan pemerintah dari SBN dapat menaikkan jumlah anggaran bantuan sosial. Kemudian, pada penelitian ini juga didapatkan kesimpulan bahwa kenaikan anggaran bantuan sosial dapat mengurangi persentase kemiskinan di Indonesia. Dengan kata lain, kebijakan bantuan sosial terbukti efektif menurunkan persentase kemiskinan di seluruh masyarakat, terutama masyarakat desa. Pada masa pandemi, angka persentase kemiskinan mengalami kenaikan. Persentase kemiskinan penduduk kota naik 15 persen; desa 2 persen; Indonesia 7 persen. Kebijakan menaikkan jumlah pagu utang berimbas pada kelonggaran mencari pendapatan dari SBN memberi efek positif bagi upaya penurunan persentase warga miskin. Jumlah SBN yang naik signifikan pada masa pandemi telah menaikkan jumlah anggaran bantuan sosial. Anggaran bantuan sosial yang naik telah dapat mereduksi persentase kemiskinan di kota, desa, dan seluruh Indonesia. Meskipun SBN dapat menurunkan persentase warga miskin di Indonesia, kewaspadaan terhadap rasio fiskal yang melemah juga harus ditingkatkan. Selain itu, optimalisasi program pengentasan kemiskinan pada

wilayah kota harus disesuaikan lagi agar lebih efektif mengurangi kemiskinan penduduk kota.

Daftar Pustaka

Acemoglu, D. S. (2003). Institutional Causes and Macroeconomic Symptoms: Volatility, Crises, and Growth. Journal of Monetary Economics, 50(1), 49-123.

Ardagna, S. d. (2014). The Political Economy of the Greek Debt Crisis: A Tale of Two Bailouts. American Economic Journal: Macroeconomics, 6(4), 291-323.

Asteriou, D. P. (2021). Public Debt and Economic Growth: Panel Data Evidence for Asian Countries. Journal of Economics and Finance,(45), 270-287.

Balvociute, R. (2020). Social Assistance for Poverty Reduction in the EU Countries: An Aspect of Socio-Economic Sustainability. European Journal of Sustainable Development, 9(1), 469. Retrieved from https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p469

Barrientos, A. (2011). Social Protection and Poverty. International Journal of Social Welfare, 20(3), 240-249. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2011.00783.x

Burnside, C. (2005). Fiscal Sustainability in Theory and Practice: A Handbook. World Bank.

Caner, M. a.-G. (2010).). Finding the Tipping Point - When Sovereign Debt Turns Bad. World Bank Policy Research Working Paper. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=1612407%20or%20http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1612407

Catao, L. A. (2005). Fiscal Deficits and Inflation. Journal of Monetary Elsevier. 52(3), 529-554.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko/DJPPR. (2023). Paparan Evaluasi Kegiatan TA 2022 dan RKA RKA TA 2023 DJPPR. R. Disampaikan pada RDP dengan Komisi.

Dufrénot, G. G. (2016). Macroeconomic Imbalances, Financial Stress and Fiscal Vulnerability in The Euro Area Before The Debt Crises: A market view. Journal of International Money and Finance, 134-146.

Fournier, J.-M. H., & Nguyen, A. D. (2022, Agustus). The Fiscal Stance in Japan. International Monetary Fund. Retrieved from https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2022/164/001.2022.issue-164-en.xml

Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid – 19 terhadap Prekonomian Indonesia. Journal of Education, Psychology, and Counseling, 146-153.

Juanda, B. d. (2022). Analisis Keberlanjutan Serta Pengaruh Surat Berharga Negara dan Faktor Lainnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. a. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik,, 3(7), 239-254.

Junaedi, D. (2018). Hubungan Antara Utang Luar Negeri dengan Perekonomian dan Kemiskinan: Komparasi Antar Rezim Pemerintahan. Jurnal BPPK, 563-387.

Mi, Y. (2008). Social Assistance and Poverty Reduction in China. China Journal of Social Work, 1(2), 189-194. Retrieved from https://doi.org/10.1080/17525090802109703

Nyathi, L. C. (2022). Social Protection Responsive Measures to Mitigate Adverse Socioeconomic Effects of COVID-19 in Southern Africa. Emerald Publishing Limited, Bingley,, 11-26. Retrieved from https://doi.org/10.1108/978-1-80117-686- 620221003.

OCBC. (2021, Desember 23). Redaksi OCBC NISP. Retrieved from Pengertian SBN (Surat Berharga Negara), Jenis & Keuntungan: https://www.ocbc.id/id/article/2021/12/23/sbn-adalah

OSBC. (2023, February 2). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Krisis Ekonomi. Retrieved from https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/02/upaya-pemerintah-dalam-mengatasi-krisis-ekonomi

Ryandini, T. (2014). Pengaruh Dana Investasi Melalui Instrumen SUN dan SBSN terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 6(1), 73-84. doi:https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1369

Samputra, P. L. (2019). Efektivitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Nonparametrik. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam.

Sinaga, E. L. (2022). Dampak Program Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Sumatra Utara. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 3(2), 116-131. Retrieved from https://doi.org/https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.416

Surhayadi. (2020). Periode Pandemi Covid-19.

World Bank, &. K. (2020). Revisiting The Impact of Government Spending & Taxes on Poverty & Inequality in Indonesia. In World Bank.

Copyright holder:
Greace Havana Tamba, Gideon Tarigan, Hendra Inbowo Simanjuntak, Viona Tasya Br Siahaan, Hamonangan Siallagan, Christnova Hasugian (2024)

First publication right:
JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

This article is licensed under: